

Fragmentasi Politik Islam Pasca-Pilpres 2024: Dinamika Dukungan Politik NU dan Muhammadiyah

¹Aris Munandar, ²Endang Susanti, ³Fadhillah Faiqoh

^{1,2}Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, ³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email:arism2365@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Presiden 2024 menjadi titik krusial dalam peta politik Islam di Indonesia, di mana organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kembali menjadi sorotan utama dalam dinamika kontestasi elektoral. Penelitian ini membahas fragmentasi politik Islam pasca-Pilpres 2024, dengan fokus pada peran strategis dua organisasi Islam terbesar tersebut dalam membentuk lanskap sosial-politik nasional. Secara kelembagaan, NU dan Muhammadiyah memang menyatakan netral dalam pemilu, namun realitas menunjukkan adanya keterlibatan aktif para anggotanya dalam partai politik tertentu. Fragmentasi ini ditandai oleh polarisasi ideologis antara kelompok moderat dan konservatif, serta absennya konsolidasi suara Islam dalam struktur kekuasaan nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis konten dan komparatif-historis untuk memahami dinamika politik Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi menyebabkan melemahnya posisi tawar politik Islam dalam mempengaruhi kebijakan publik, serta membuka ruang bagi kelompok pragmatis dan sekuler untuk mendominasi kekuasaan. Namun demikian, terdapat peluang rekonsolidasi melalui dialog lintas organisasi dan penguatan peran sosial-keagamaan NU dan Muhammadiyah. Kontribusi mereka dalam memperkuat demokrasi, baik melalui pendidikan politik warga maupun peran sebagai penyeimbang kekuasaan, sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan inklusivitas demokrasi Indonesia. Studi ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif antarorganisasi Islam untuk mengatasi fragmentasi dan membangun basis politik Islam yang progresif dan adaptif terhadap demokrasi modern.

Kata Kunci: *Politik Islam, Fragmentasi Politik, NU dan Muhammadiyah, Pilpres 2024*

Abstract

The 2024 Presidential Election is a crucial point in the map of Islamic politics in Indonesia, where religious organizations such as Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah are again the main spotlight in the dynamics of electoral contestation. This research discusses the fragmentation of Islamic politics after the 2024 presidential election, focusing on the strategic role of the two largest Islamic organizations in shaping the national socio-political landscape. Institutionally, NU and Muhammadiyah do declare neutrality in elections, but reality shows the active involvement of their members in certain political parties. This fragmentation is marked by ideological polarization between moderate and conservative groups, as well as the absence of the consolidation of Islamic voices in the national power structure. This study uses the library research method with a content analysis and comparative-historical approach to understand the dynamics of contemporary Islamic politics. The results show that fragmentation leads to a weakening of Islam's political bargaining position in influencing public policy, as well as opening up space for pragmatic and secular groups to dominate power. However, there are opportunities for consolidation through cross-organizational dialogue and strengthening the socio-religious role of NU and Muhammadiyah. Their contribution in strengthening democracy, both through citizen political education and their role as a balance of power, is crucial in maintaining the stability and inclusiveness of Indonesian democracy. This study recommends a collaborative approach between Islamic organizations to address fragmentation and build a progressive and adaptive Islamic political base for modern democracy.

Keywords: *Islamic Politics, Political Fragmentation, NU and Muhammadiyah, 2024 Presidential Election*

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menandai dinamika politik baru di Indonesia, terutama dalam konteks keterlibatan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung (Aris & Susanti, 2024). Meskipun secara kelembagaan keduanya sering kali menegaskan sikap netral dalam pemilu, realitas politik menunjukkan bahwa baik NU maupun Muhammadiyah tidak terlepas dari kepentingan politik praktis, terutama melalui afiliasi para anggotanya dengan partai politik tertentu (Khoiri, 2013). Pilpres 2024 menjadi ajang pertarungan ideologis yang memperlihatkan bagaimana kelompok-kelompok Islam membangun aliansi politiknya masing-masing.

Dalam proses politik menjelang Pilpres 2024, NU dan Muhammadiyah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi dinamika kontestasi elektoral. NU, yang memiliki kedekatan historis dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), secara tidak langsung terlibat dalam arena politik melalui

tokoh-tokohnya yang memiliki hubungan erat dengan partai-partai tertentu. Sementara itu, Muhammadiyah cenderung lebih menjaga jarak dari politik praktis, tetapi tetap memberikan panduan moral bagi warganya dalam menentukan pilihan politik (Sumantri dkk., 2025). Perbedaan ini menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia tidak bersifat monolitik, melainkan beragam dan kompleks.

Kontestasi Pilpres 2024 juga diwarnai dengan polarisasi politik yang melibatkan kelompok-kelompok Islam dalam berbagai spektrum ideologi (Said, 2023). Di satu sisi, terdapat upaya dari kelompok Islam moderat untuk menjaga keseimbangan dalam politik nasional, sementara di sisi lain, kelompok Islam konservatif semakin menguat dengan mengusung narasi politik identitas. Polarisasi ini tidak hanya terjadi di tingkat elite, tetapi juga di akar rumput, di mana pemilih dari kalangan Muslim terpecah dalam mendukung pasangan calon tertentu (Abadi, 2024). Hal ini memperlihatkan bagaimana fragmentasi politik Islam semakin terlihat jelas dalam kontestasi elektoral di Indonesia.

Setelah pasca pilpres arah politik Islam di Indonesia menjadi pertanyaan penting untuk dikaji lebih dalam. Salah

satu isu utama yang muncul adalah apakah kekuatan politik Islam akan mengalami rekonsolidasi atau justru semakin terfragmentasi. Dalam beberapa pemilu sebelumnya, organisasi Islam cenderung melakukan konsolidasi setelah proses pemilu usai, baik dalam bentuk dukungan terhadap pemerintahan yang terpilih maupun dalam peran kritisnya sebagai bagian dari masyarakat sipil. Namun, dengan meningkatnya fragmentasi politik dalam Pilpres 2024, potensi perpecahan lebih lanjut di kalangan politik Islam juga semakin besar.

Fragmentasi politik Islam dapat berimplikasi pada dinamika kekuasaan di Indonesia. Jika kelompok-kelompok Islam gagal menemukan titik temu dalam menyikapi pemerintahan yang baru, maka kekuatan politik Islam akan semakin melemah dalam menentukan arah kebijakan negara. Sebaliknya, jika NU dan Muhammadiyah mampu melakukan rekonsolidasi, maka mereka dapat menjadi kekuatan penyeimbang yang efektif dalam menjaga stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana respons kedua organisasi ini terhadap hasil Pilpres 2024 dan bagaimana posisi

mereka dalam lanskap politik pasca-pemilu.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji keterlibatan organisasi Islam dalam politik nasional dan potensi fragmentasinya sudah dilakukan, seperti halnya Miftahussurur yang menyoroti dinamika dan fragmentasi Islam politik di Indonesia, fokus pada hubungan antara dinamika Islam politik dengan proses historisnya dan konteks sosial-politiknya. Sebaliknya, fragmentasi tersebut tampaknya lebih disebabkan oleh kepentingan elit daripada pertikaian ideologi (Miftahussurur, 2011). Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Ali Mas'ad mengungkap soal preferensi politik umat Islam terhadap partai-partai Islam dan bagaimana hal ini memengaruhi peta politik nasional (Mas'ad, 2021). Sementara itu, Hardianty Zainudin mengidentifikasi bahwa sebagai organisasi dan juga sebagai kelompok kepentingan, preferensi politik organisasi Muhammadiyah dan NU dapat diidentifikasi berdasarkan motif politik yang di miliki. Ketiga kajian ini menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika internal organisasi, kepentingan aktor politik, dan respons

terhadap konfigurasi kekuasaan. Oleh karena itu, menelaah kembali peran NU dan Muhammadiyah dalam lanskap politik pasca-Pilpres 2024 menjadi penting untuk melihat arah politik Islam ke depan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara politik Islam dan dinamika kekuasaan di Indonesia pasca-Pilpres 2024. Fokus utama penelitian ini adalah melihat sejauh mana fragmentasi politik Islam berdampak pada stabilitas politik dan bagaimana organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah beradaptasi dalam konteks politik yang terus berubah. Dengan memahami pola-pola fragmentasi ini, dapat diketahui apakah politik Islam akan tetap menjadi kekuatan yang berpengaruh atau mengalami pelemahan signifikan dalam sistem politik Indonesia.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam membangun sinergi politik yang konstruktif dalam konteks pemerintahan pasca-Pilpres 2024. Penelitian ini menyoroti bagaimana kedua organisasi tersebut merespons dinamika politik nasional yang kian kompleks, terutama di tengah

fragmentasi internal umat Islam dan meningkatnya polarisasi ideologis. Pendekatan terhadap sinergi politik yang dimaksud tidak hanya terbatas pada dukungan elektoral, tetapi juga mencakup kontribusi dalam perumusan kebijakan publik, advokasi nilai-nilai moderasi, serta penguatan demokrasi melalui peran sosial-keagamaan yang transformatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memahami fenomena fragmentasi politik Islam di Indonesia, khususnya setelah momentum Pilpres 2024. Temuan dari studi ini juga ditujukan sebagai masukan strategis bagi para pembuat kebijakan, elite organisasi keagamaan, serta masyarakat sipil dalam merumuskan arah gerak politik Islam yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan kolektif bangsa. Melalui pendekatan yang komprehensif dan interdisipliner, penelitian ini berupaya menawarkan perspektif baru terhadap relasi antara Islam dan politik dalam lanskap demokrasi Indonesia yang terus mengalami transformasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

library research atau studi kepustakaan yang bertujuan menganalisis fragmentasi politik Islam pasca-Pilpres 2024 serta dinamika hubungan antara politik Islam dan struktur kekuasaan di Indonesia. (Adlini dkk., 2022).

Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa studi kepustakaan memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap teori, konsep, dan data sekunder yang relevan untuk memahami transformasi politik Islam setelah pemilu. Pendekatan ini memberikan ruang komprehensif untuk menelaah berbagai sumber ilmiah, termasuk jurnal akademik, buku, laporan penelitian, publikasi resmi dari organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta artikel media massa untuk memahami perkembangan wacana politik Islam dalam diskursus publik.

Kriteria pemilihan literatur dilakukan secara sistematis untuk memastikan kualitas dan relevansi sumber penelitian. Aspek temporal diprioritaskan pada publikasi tahun 2020-2024 untuk menangkap dinamika politik Islam kontemporer, dengan penekanan khusus pada sumber pasca-Pilpres 2024 untuk analisis dampak

langsung. Kualitas sumber diprioritaskan pada jurnal akademik terakreditasi, buku akademik dari penerbit universitas terkemuka, laporan penelitian dari lembaga survei kredibel seperti LSI, CSIS, dan Litbang Kompas, serta dokumen resmi organisasi keagamaan. Relevansi topik difokuskan pada literatur yang membahas fragmentasi politik Islam di Indonesia, perilaku politik organisasi keagamaan, dan dinamika hubungan agama-politik dalam konteks demokrasi.

Proses pengumpulan dan seleksi data dilakukan melalui tahapan sistematis yang dimulai dengan pencarian menggunakan kata kunci "fragmentasi politik Islam", "NU Muhammadiyah politik", dan "pemilu 2024 Islam Indonesia", kemudian dilanjutkan dengan screening berdasarkan relevansi judul dan abstrak. Keragaman perspektif diutamakan dengan menyertakan sudut pandang berbagai aliran pemikiran politik Islam, menggabungkan perspektif akademisi, praktisi, dan pengamat politik, serta mengintegrasikan pendekatan teoretis dan empiris dari berbagai disiplin ilmu politik, sosiologi, dan studi agama. Prioritas diberikan pada literatur berbahasa Indonesia untuk konteks lokal

dan literatur berbahasa Inggris untuk kerangka teoretis, dengan memastikan semua sumber dapat diakses melalui database akademik dan repositori institusional yang kredibel.

Analisis data menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi pola-pola argumentasi, wacana politik, serta hubungan antara organisasi Islam dan aktor politik lainnya dalam pemerintahan pasca-pemilu. Teknik komparatif-historis juga diterapkan untuk membandingkan dinamika politik Islam pasca-Pilpres 2024 dengan pemilu sebelumnya, guna mengidentifikasi pola tertentu dalam relasi politik Islam dan kekuasaan di Indonesia. Pendekatan analisis ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang sikap NU dan Muhammadiyah terhadap hasil Pilpres 2024, apakah mereka cenderung melakukan rekonsolidasi politik atau mengalami fragmentasi lebih lanjut.

Sebagai penelitian berbasis studi kepustakaan, penelitian ini memiliki keterbatasan berupa tidak tersedianya data primer melalui wawancara langsung dengan aktor politik. Namun, penggunaan sumber-sumber akademik yang komprehensif dan analisis sistematis diharapkan dapat

memberikan kontribusi akademik signifikan dalam memahami arah politik Islam di Indonesia pasca-Pilpres 2024.

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta organisasi Islam dalam merumuskan strategi politik yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai demokrasi, sekaligus memberikan landasan untuk penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris yang lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertarungan Ideologi dan Dinamika Fragmentasi Politik Islam

Pertarungan ideologi dalam politik Islam pasca-Pilpres 2024 mencerminkan ketegangan antara kelompok-kelompok Islam moderat dan konservatif yang semakin terlihat dalam berbagai arena politik nasional. Dalam konteks ini, ideologi tidak hanya menjadi bingkai normatif, tetapi juga menjadi alat mobilisasi politik untuk menggalang dukungan elektoral. Kelompok Islam moderat seperti yang diwakili oleh NU dan sebagian tokoh Muhammadiyah cenderung mempromosikan nilai-nilai Islam yang inklusif dan adaptif terhadap demokrasi, sedangkan kelompok konservatif lebih menekankan pada politik identitas dan simbolisme

keagamaan dalam agenda politik mereka (Fealy, 2012).

Perbedaan ideologis tersebut turut membentuk dinamika fragmentasi politik Islam yang mengakar hingga ke basis massa. Ketika partai-partai politik berlomba menarik dukungan dari komunitas Muslim, organisasi Islam tidak lagi menjadi satu suara (Basuki, 2020). Misalnya, dukungan dari tokoh-tokoh NU terhadap PKB tidak serta-merta mewakili seluruh warga NU, dan hal serupa terjadi pada Muhammadiyah, yang lebih plural dalam pilihan politik anggotanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi dominasi ideologis tunggal dalam komunitas Islam, melainkan terjadi perbedaan kepentingan politik (Burhani, 2013).

Fragmentasi ini diperparah oleh masuknya aktor-aktor baru yang mencoba mengkapitalisasi narasi keagamaan untuk kepentingan elektoral. Munculnya kelompok-kelompok seperti Persaudaraan Alumni 212 dan jaringan Islam politik baru menjadi indikator bahwa wacana Islam politik semakin kompetitif dan terfragmentasi. Mereka kerap menggunakan platform digital untuk menyebarkan pandangan ideologis yang bersifat eksklusif, yang secara tidak

langsung menimbulkan polarisasi di kalangan umat Islam (Hasan, 2019).

Sementara itu, arena politik formal juga menunjukkan gejala fragmentasi yang serupa. Alih-alih membentuk koalisi berbasis kesamaan ideologi Islam, partai-partai dengan basis massa Muslim justru lebih memilih strategi pragmatis. Hal ini menyebabkan hilangnya kesatuan suara politik Islam di parlemen dan melemahkan daya tawar politik Islam secara kolektif. Dalam konteks ini, perbedaan strategi politik justru menjadi sumber utama fragmentasi, bukan semata-mata persoalan ideologi (Mietzner, 2015).

Lebih jauh, pertarungan ideologi ini memengaruhi arah kebijakan dan pembentukan opini publik. Ketika wacana keagamaan dibingkai dalam konflik ideologis, masyarakat Muslim cenderung terbelah dalam menanggapi isu-isu sosial-politik. Salah satu contohnya adalah respons terhadap isu RUU Pesantren dan RUU Perlindungan Ulama, yang diperdebatkan secara intens oleh kelompok konservatif dan moderat. Ketidakmampuan untuk menyatukan pandangan ini menegaskan bahwa fragmentasi tidak hanya terjadi pada

level elite, tetapi juga di akar rumput (Nakamura, 2012).

Selain itu, dinamika pertarungan ideologi juga berdampak pada relasi antara Islam dan negara. Ketika kelompok Islam memiliki visi yang berbeda mengenai peran agama dalam negara, maka relasi yang dibangun pun menjadi timpang dan penuh kompetisi. NU, yang secara historis mendukung Pancasila sebagai dasar negara, berbeda dengan beberapa kelompok Islam politik yang masih memperjuangkan syariat sebagai dasar hukum publik. Perbedaan ini terus berulang dalam wacana publik, menghalangi terciptanya agenda bersama (Bruinessen, 2013).

Namun, di balik pertarungan ideologi ini, terdapat juga potensi untuk rekonsolidasi. Sejumlah tokoh Islam menyadari pentingnya membangun sinergi antar kelompok demi kepentingan umat secara luas. Dialog antar organisasi Islam yang difasilitasi oleh lembaga independen, akademisi, maupun negara dapat menjadi jembatan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan ideologis tersebut. Bila tidak segera diupayakan, fragmentasi ideologi ini dapat membahayakan stabilitas sosial-politik nasional, terutama di

tengah krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi (Barton, 1970).

Dengan demikian, pertarungan ideologi dalam politik Islam pasca-Pilpres 2024 tidak dapat dilihat secara parsial. Ia merupakan hasil dari akumulasi dinamika sejarah, perubahan sosial, serta respons terhadap sistem politik demokratis yang terbuka. Untuk memahami dan mengatasi fragmentasi ini, dibutuhkan pendekatan inklusif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek politik praktis, tetapi juga pertimbangan teologis, kultural, dan sosiologis dari umat Islam di Indonesia.

Politik Islam Pascapemilu

Pasca Pilpres 2024, wajah politik Islam di Indonesia mengalami tantangan serius dalam hal konsolidasi dan arah perjuangan politik. Fragmentasi yang tajam selama masa kampanye tidak langsung menghilang setelah pemungutan suara selesai (Arifin, 2022). Sebaliknya, rivalitas politik di antara kelompok Islam justru berlanjut dalam bentuk manuver pascapemilu, seperti perebutan posisi strategis di parlemen dan upaya memengaruhi kebijakan publik. Ini menunjukkan bahwa politik Islam tidak hanya aktif selama pemilu, tetapi juga memainkan peran penting

dalam proses transisi kekuasaan (Harvey, 2021).

Salah satu dampak nyata dari kontestasi politik yang kuat adalah munculnya ketidakpastian dalam arah gerak politik kelompok Islam. Sejumlah organisasi Islam mengalami disorientasi strategi, apakah harus tetap menjadi kekuatan penekan dari luar sistem (oposisi) atau berupaya menjadi bagian dari koalisi kekuasaan (Susanti & Munandar, 2024). Perdebatan ini tidak hanya terjadi di kalangan elite organisasi, tetapi juga menjalar hingga ke masyarakat bawah. Dalam konteks ini, NU cenderung lebih fleksibel dengan kembali mendekati ke lingkaran kekuasaan, sementara Muhammadiyah terlihat lebih hati-hati dan menjaga jarak dengan elite politik (Burhanudin, 2007).

Pascapemilu juga menjadi momentum evaluasi terhadap keterlibatan politik praktis oleh organisasi keagamaan. Banyak kalangan akademisi dan pemuka agama mempertanyakan sejauh mana keikutsertaan tokoh-tokoh agama dalam politik elektoral dapat memberikan dampak positif (Aji & Yunus, 2019). Tidak sedikit yang menilai bahwa keterlibatan tersebut justru

mengaburkan peran moral dan sosial organisasi Islam. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki akar kuat dalam masyarakat namun juga rentan terhadap eksploitasi politik (Mujani & Liddle, 2020).

Di sisi lain, peran digitalisasi dan media sosial tidak bisa diabaikan dalam menentukan arah politik Islam pascapemilu. Narasi politik berbasis agama masih kuat berseliweran di ruang digital, memengaruhi opini publik dan membentuk kutub-kutub politik baru. Dalam banyak kasus, platform ini menjadi arena kontestasi wacana antara kelompok Islam tradisional, modernis, dan konservatif (Munandar dkk., 2025). Namun, kecepatan informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman substansi, sehingga fragmentasi kerap terjadi akibat distorsi informasi dan propaganda sektarian (Tapsell, 2018).

Dalam konteks kebijakan, politik Islam pascapemilu belum menunjukkan agenda kolektif yang terkoordinasi. Beberapa partai berbasis Islam terlihat lebih sibuk memperjuangkan kepentingan sempit, seperti penguatan posisi politik dan sumber daya, ketimbang menyusun kebijakan

substansif yang berbasis pada keadilan sosial dan pemberdayaan umat. Hal ini berisiko memperlemah posisi politik Islam dalam jangka panjang karena kehilangan kepercayaan dari basis pendukungnya yang menginginkan solusi nyata atas persoalan ekonomi, pendidikan, dan ketimpangan sosial (Hamayotsu, 2011).

Meski demikian, terdapat upaya dari sebagian tokoh Islam untuk mendorong politik rekonsiliatif. Isu-isu seperti toleransi antarumat, pembangunan inklusif, dan penguatan demokrasi mulai diangkat kembali sebagai narasi bersama lintas organisasi Islam. NU dan Muhammadiyah, dengan pendekatan kultural dan strukturalnya masing-masing, memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan antar kutub politik yang terpolarisasi. Namun, hal ini memerlukan komitmen nyata untuk meninggalkan politik identitas eksklusif dan kembali pada misi keumatan yang lebih luas (Latif, 2011).

Faktor eksternal seperti tekanan dari elite politik, kepentingan ekonomi, dan relasi internasional juga memengaruhi arah politik Islam pascapemilu. Beberapa negara donor dan jaringan internasional memiliki pengaruh dalam mengarahkan sikap politik organisasi Islam tertentu,

terutama melalui kerja sama keagamaan dan program bantuan. Jika tidak dikelola secara bijak, intervensi semacam ini berpotensi memperuncing fragmentasi dan melemahkan kemandirian politik Islam di Indonesia (Supriyadi, 2015).

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, politik Islam pascapemilu berada pada persimpangan penting antara menjadi kekuatan moral yang memperkuat demokrasi atau sekadar aktor politik oportunistik yang terjebak dalam dinamika kekuasaan jangka pendek. NU dan Muhammadiyah memiliki peran strategis untuk menentukan arah ini, baik melalui konsolidasi internal maupun membangun dialog strategis dengan kelompok lain. Tanpa adanya langkah nyata menuju rekonsolidasi, maka politik Islam berisiko kehilangan relevansinya dalam peta politik nasional.

Implikasi Fragmentasi Politik Islam terhadap Struktur Kekuasaan

Fragmentasi politik Islam yang kian nyata pasca-Pilpres 2024 membawa konsekuensi langsung terhadap struktur kekuasaan di Indonesia. Ketidakterpaduan suara kelompok Islam menyebabkan melemahnya posisi tawar mereka dalam sistem politik nasional, khususnya dalam proses pembentukan

kebijakan dan alokasi sumber daya. Sebelumnya, ketika kelompok-kelompok Islam mampu menyatukan agenda politik, mereka dapat menekan pemerintah dalam isu-isu strategis seperti pendidikan Islam, ekonomi syariah, dan perlindungan moral publik. Namun kini, kekuatan tersebut mulai terpecah dan kehilangan efektivitas kolektif (Salim, 2015).

Dalam struktur kekuasaan formal, fragmentasi ini memperlihatkan dampaknya melalui minimnya keterwakilan politik Islam dalam jabatan strategis pemerintahan. Ketika suara umat Muslim terbagi dalam mendukung berbagai partai politik, maka hasilnya adalah fragmentasi representasi, yang menyebabkan partai-partai Islam tidak cukup kuat untuk menempatkan kadernya dalam posisi pengambilan keputusan penting. Ini berbanding terbalik dengan masa lalu ketika kesatuan politik Islam mampu membentuk fraksi kuat di DPR dan lembaga negara lainnya (Dewi dkk., 2025).

Selain itu, fragmentasi politik juga menciptakan ruang bagi kekuatan sekuler dan pragmatis untuk mendominasi lanskap kekuasaan. Ketika

kelompok-kelompok Islam saling bersaing dan kehilangan arah strategis, partai-partai non-Islam atau nasionalis menjadi lebih leluasa dalam menguasai ruang politik. Ini tidak hanya berimplikasi pada hilangnya representasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, tetapi juga melemahkan upaya advokasi untuk isu-isu seperti pemberantasan korupsi berbasis moral agama dan peningkatan kesejahteraan umat (Fealy, 2016).

Di level masyarakat bawah, fragmentasi menyebabkan munculnya kegelisahan dan kekecewaan terhadap para elite politik Islam. Banyak komunitas Muslim yang merasa tidak lagi memiliki wakil yang benar-benar memperjuangkan aspirasi mereka secara konsisten. Ketika para politisi Islam dianggap lebih sibuk berseteru antar faksi daripada membela umat, maka legitimasi politik Islam mengalami erosi. Hal ini menciptakan celah bagi munculnya aktor-aktor baru yang menjanjikan "politik alternatif" dengan pendekatan populis atau bahkan ekstremis (Hasan, 2021).

Dari perspektif institusional, fragmentasi juga menyebabkan kelemahan dalam membangun koalisi

yang stabil dan berbasis nilai. Dalam sistem demokrasi parlementer, koalisi sangat penting untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Ketika kelompok Islam tidak mampu menyatukan diri, maka mereka tidak dapat berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang atau "kingmaker". Potensi mereka untuk membentuk aliansi strategis guna memengaruhi arah kekuasaan pun melemah secara signifikan (Mietzner, 2015).

Secara ideologis, fragmentasi politik Islam juga berdampak pada ketidakjelasan posisi terhadap isu-isu besar nasional seperti revisi undang-undang keagamaan, moderasi beragama, dan radikalisme. Ketidaksatuan sikap antara organisasi Islam menyebabkan hilangnya satu suara dalam memengaruhi regulasi publik. Misalnya, dalam perdebatan tentang RUU Pesantren atau Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ketidaksepahaman antara kelompok Islam justru memberi peluang kepada kekuatan eksternal untuk mengatur sesuai kepentingannya (Ali-Fauzi, 2017).

Namun, tidak semua konsekuensi dari fragmentasi bersifat negatif. Dalam kerangka demokrasi, fragmentasi juga dapat dilihat sebagai dinamika

diferensiasi politik yang sehat, selama tetap berada dalam batas-batas deliberasi publik dan tidak mengarah pada konflik horizontal. Pluralisme dalam politik Islam bisa menjadi kekuatan apabila dikawal dengan semangat kolaborasi dan saling menghormati perbedaan strategi maupun orientasi dakwah politik (Barton & Fealy, 1996).

Dengan demikian, fragmentasi politik Islam pasca-Pilpres 2024 menjadi tantangan serius bagi efektivitas kekuasaan Islam dalam struktur negara. Namun, jika ditangani dengan bijak dan diarahkan pada pola sinergi antar kelompok, fragmentasi ini justru dapat membuka ruang bagi pembaruan strategi politik Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan umat di era demokrasi kontemporer.

Peran NU dan Muhammadiyah dalam Gerakan Sosial Keagamaan dan Politik

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki posisi strategis dalam membentuk dinamika sosial dan politik nasional. Keduanya tidak hanya bergerak di ranah keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam memengaruhi kebijakan publik, arah demokrasi, dan pembangunan

masyarakat. Dalam sejarahnya, NU dan Muhammadiyah telah menjadi pilar *civil society* yang memperkuat akar sosial keagamaan Indonesia, baik melalui pendidikan, dakwah, kesehatan, maupun advokasi kebijakan (Azca dkk., 2021).

Dalam konteks sosial keagamaan, NU dan Muhammadiyah memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi. NU mengedepankan pendekatan tradisional, kultural, dan berbasis komunitas pesantren, sementara Muhammadiyah lebih modern, rasional, dan fokus pada pendidikan serta pelayanan sosial. Kedua pendekatan ini telah membentuk struktur masyarakat Muslim yang plural dan dinamis. Melalui ribuan sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial, kontribusi mereka dalam membangun ketahanan masyarakat sangat signifikan (Ichwan, 2013).

Dalam bidang politik, meskipun secara formal keduanya menyatakan independensi dari partai politik, kenyataannya hubungan antara organisasi ini dengan kekuasaan negara tetap eksis dalam bentuk informal. NU, khususnya, memiliki kedekatan historis dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan Muhammadiyah

meskipun lebih menjaga jarak, anggotanya kerap terlibat aktif dalam berbagai partai politik dan lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas institusional tidak menghalangi partisipasi politik anggotanya secara individu (Fealy & White, 2008).

Pascapemilu 2024, peran NU dan Muhammadiyah menjadi semakin penting dalam merespons ketegangan sosial-politik akibat polarisasi. Kedua organisasi ini diharapkan mampu menjadi penengah yang meredam konflik dan membangun dialog lintas kelompok. Muhammadiyah, misalnya, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, menawarkan perspektif keislaman yang rasional dan toleran dalam menyikapi isu politik identitas. NU pun melalui forum Bahtsul Masail dan Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU berusaha menjaga moderasi beragama (Bruinessen, 2013).

Di sisi lain, tantangan terbesar bagi NU dan Muhammadiyah dalam gerakan sosial-politik adalah mempertahankan integritas moral di tengah godaan politik praktis. Keterlibatan tokoh-tokoh mereka dalam kontestasi politik sering menimbulkan persepsi publik bahwa organisasi ini telah terseret dalam arus

pragmatisme. Hal ini bisa melemahkan kepercayaan publik, terutama dari kalangan muda Muslim yang lebih idealis dan kritis terhadap elite agama (Sumiyanto dkk., 2022).

Namun demikian, NU dan Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi substantif di Indonesia. Dengan jaringan yang luas, mereka dapat menggerakkan partisipasi politik warga yang cerdas dan etis. Peran mereka sebagai “watchdog” terhadap kebijakan negara juga penting, terutama dalam isu-isu seperti radikalisme, keadilan sosial, dan kebebasan beragama. Melalui pendidikan kader dan penguatan organisasi masyarakat, mereka dapat menjadi benteng dari penetrasi ideologi ekstremis dan eksklusif (Salim, 2015).

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, NU dan Muhammadiyah juga dituntut untuk memperkuat peran di dunia maya. Dakwah digital, narasi toleransi, serta kampanye keislaman yang sejuk harus dikembangkan untuk menyaingi dominasi kelompok radikal di ruang daring. Upaya Muhammadiyah dalam digitalisasi konten dakwah dan NU melalui kanal-kanal pesantren digital adalah langkah awal yang baik, namun masih perlu diperluas dengan dukungan

teknologi dan strategi komunikasi yang sistematis (Tapsell, 2018).

Akhirnya, keberlanjutan peran NU dan Muhammadiyah sebagai aktor sosial-keagamaan dan politik akan sangat ditentukan oleh konsistensi nilai, keteguhan organisasi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika zaman. Jika mampu menjaga independensi, membina kader ideologis, dan membangun jaringan strategis lintas sektor, keduanya akan tetap menjadi kekuatan transformasional dalam menjaga arah moral dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Fragmentasi politik Islam pasca-Pilpres 2024 mencerminkan pergeseran signifikan dalam konfigurasi politik umat Islam di Indonesia yang ditandai oleh polarisasi ideologis antara kelompok moderat dan konservatif, serta absennya konsolidasi kekuatan Islam dalam struktur kekuasaan nasional. Meskipun secara institusional NU dan Muhammadiyah menyatakan sikap netralnya, namun pada kenyataannya anggota dan elite mereka tetap terlibat dalam dinamika politik elektoral melalui afiliasi dengan partai-partai tertentu.

Fragmentasi di kalangan kelompok Islam pasca-Pilpres 2024 telah melemahkan posisi politik Islam. Perbedaan pandangan dan kurangnya kesatuan membuat kelompok-kelompok Islam kehilangan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan publik. Hal ini memberi ruang bagi kekuatan sekuler dan pragmatis untuk lebih dominan. Fragmentasi ini juga meningkatkan resiko konflik identitas di masyarakat karena umat Islam terpecah dalam pilihan dan sikap politik.

Akan tetapi, fragmentasi ini masih bisa diatasi. NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam menyatukan kembali kekuatan politik Islam. Melalui dialog, kerjasama antar organisasi, dan penguatan nilai-nilai keagamaan yang moderat dan demokratis, politik Islam menjadi lebih inklusif dan adaptif. Dengan begitu, Islam tetap dapat menjadi kekuatan moral yang menjaga stabilitas dan arah demokrasi di Indonesia.

Penelitian merekomendasikan pengembangan platform dialog strategis antar organisasi Islam, penguatan pendidikan politik berbasis nilai moderat, dan peningkatan kapasitas

organisasi keagamaan menghadapi tantangan digitalisasi dan polarisasi politik, meskipun keterbatasan metode studi kepustakaan memerlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris.

REFENSI

Abadi, M. Z. (2024). Politik Identitas di Panggung Demokrasi: Melihat Simbol Agama Melalui Lensa Habitus dan Dramaturgi. *Politik Islam*, 3(2), 96–117.

<https://doi.org/10.31958/pi.v3i2.13898>

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.

<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>

Aji, A. M., & Yunus, N. R. (2019). Identity Politics in Cultural and Structural Islam in Indonesia. *AHKAM:*

- Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.10860>
- Arifin, I. (2022). Agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpres, sebagai sebuah realitas politik di Indonesia. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4), Article 4.
<https://doi.org/10.29210/020221706>
- Aris, & Susanti, E. (2024). The Contribution of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Strengthening Democracy in Indonesia: A Study of Moderate Islamic Politics. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 1(01), Article 01.
- Azca, M. N., Salim, H., Arrobi, M. Z., Asyhari, B., & Usman, A. (2021). *DUA MENYEMAI DAMAI: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam*
- Perdamaian dan Demokrasi*. UGM PRESS.
- Barton, G. (1970). Indonesia's Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as Intellectual 'Ulamā': The Meeting of Islamic Traditionalism and Modernism in neo-Modernist Thought. *Studia Islamika*, 4(1).
<https://doi.org/10.15408/sdi.v4i1.786>
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81-94.
<https://doi.org/10.30595/kosmik.hukum.v20i2.8321>
- Bruinessen, M. van (Ed.). (2013). *Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the "conservative turn."* Institute of Southeast Asian Studies.

- Burhani, A. N. (2013). 2. Defining Indonesian Islam. An examination of the construction of the national Islamic identity of traditionalist and modernist Muslims. Dalam J. Burhanudin & K. van Dijk (Ed.), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (hlm. 25–48). Amsterdam University Press. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9789048516254-003/pdf?licenseType=restricted>
- Burhanudin, J. (2007). *Islamic knowledge, authority and political power*.
- Dewi, K., Nurmandi, A., & Fridayani, H. D. (2025). Mencermati Demokratisasi dalam Proses Kepengurusan Partai Politik di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.262>
- Fealy, G. (2012). *Ijtihad Politik Ulama ; Sejarah NU 1952-1967*. Lkis Pelangi Aksara.
- Hamayotsu, K. (2011). The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia. *Asian Survey*, 51(5), 971–992. <https://doi.org/10.1525/as.2011.51.5.971>
- Harvey, E. (2021). The Decline of Green-Glazed Jars after the Early Abbasid Period. *Islamic Law and Society*, 28(4), 415–457. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10012>
- Khoiri, N. (2013). Pemikiran Politik Hukum Islam Muhammadiyah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 47(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i1.61>

- Mas'ad, A. (2021). FRAGMENTASI PARTAI-PARTAI ISLAM PASCA ORDE BARU. *Jurnal Keislaman*, 2(1), 48-55. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i1.3374>
- Mietzner, M. (with East-West Center). (2015). *Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia*. East-West Center.
- Miftahussurur, M. (2011). PASANG SURUT DAN FRAGMENTASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA. *Dialog*, 34(2), Article 2. <https://doi.org/10.47655/dialog.v34i2.156>
- Munandar, A., Muttaqin, F. F., & Susanti, E. (2025). Media Sosial antara Hegemoni dan Emansipasi: Tinjauan Kritis terhadap Peran Edukatif dalam Demokrasi Digital. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 2(1), Article 1.
- Nakamura, M. (2012). *The crescent arises over the banyan tree: A study of the Muhammadiyah movement in a central Javanese town, c. 1910-2010* (2nd enlarged ed). Institute of Southeast Asian Studies.
- Said, R. W. (2023). FENOMENA POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILU DI INDONESIA. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.233>
- Salim, A. (2015). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh University Press. <https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt14brz2b>
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta*

-
- Research and Development.* Susanti, E., & Munandar, A. (2024).
Pustaka. Dinamika Politik Islam di Eropa:
Sumantri, I., Prameswari, E. S., & Sejarah dan Realitas Politik
Priyanto, A. S. (2025). Kontemporer. *Politea: Jurnal*
Demokratisasi di tingkat lokal: NU *Pemikiran Politik Islam*, 7(2), 359–
dan Muhammadiyah dalam 353.
Pilpres 2024 di Kota Salatiga.
Journal of Political Issues, 6(2),
Article 2.
[https://doi.org/10.33019/jpi.v6i
2.302](https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.302)
- Sumiyanto, A., Jahidin, U., Alfi, N.,
Kardiyanto, W., Yuliawan, A.,
Zaini, A., Giyanto, A., Ratnawati, L.,
Rahayu, W., Khoirudin, A., &
Rahmawati, E. (2022). *Menjadi
Muhammadiyah*. Pandiva Buku.
- Supriyadi, M. (2015). Politisasi Agama di
Ruang Publik: Komunikasi SARA
dalam Perdebatan. *Jurnal
Keamanan Nasional*, 1(3), 317–
426.